

**PERAN PGRI DALAM PELANGGARAN KODE ETIK GURU, BERDAMPAK
PADA TUJUAN PEMBELAJARAN**

**Agustrio Mahanggana Angkat¹, Angelina Labora Dorasi Lumban Gaol², Ayub
Desrika Simorangkir³, Juwita Helena Sitompul⁴, Philip Hamonangan Sinaga⁵,
Rohana Manalu⁶**

Universitas Negeri Medan

agusangkat2@gmail.com angelinalumbangaol20@gmail.com
ayubsimorangkir1@gmail.com juwitahelena12@gmail.com
phasonangansinaga@gmail.com rohanamanalu02@gmail.com

ABSTRACT

The teacher's code of ethics is a guideline for teachers' behavior in maintaining the integrity and professionalism of teachers in the world of education. Violations of the teacher's code of ethics such as discrimination, abuse of authority or power and extortion can affect the effectiveness of the implementation of the teacher's code of ethics which has an impact not only on the teacher but also on students and parents of students. The existence of PGRI certainly plays a role in supporting a conducive classroom atmosphere through the implementation of an effective teacher's code of ethics. PGRI (Indonesian Teachers Association) has a significant role through policy advocacy training and competency development. With the implementation of a good code of ethics, it is hoped that students will be created who are moral and responsible. This study uses qualitative descriptive through interviews and literature studies with the results showing that violations of the teacher's code of ethics have a negative impact on the achievement of learning objectives and student quality.

Keywords: *teacher's code of ethics, professionalism, PGRI, learning objectives*

ABSTRAK

Kode etik guru merupakan pedoman perilaku bagi guru dalam menjaga integritas dan profesionalisme guru dalam dunia pendidikan. Tindakan pelanggaran kode etik guru seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan dan tindakan pungutan liar dapat mempengaruhi efektifitas implementasi kode etik guru yang berdampak tidak hanya pada guru tersebut tetapi juga berdampak pada siswa maupun orang tua siswa. Adanya PGRI

tentu berperan dalam mendukung suasana kelas yang kondusif lewat implementasi kode etik guru yang efektif. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) memiliki peran yang signifikan melalui pelatihan advokasi kebijakan dan pengembangan kompetensi. Dengan pelaksanaan kode etik yang baik diharapkan tercipta siswa yang bermoral dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka dengan hasil menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik guru berdampak negatif pada pencapaian tujuan pembelajaran dan kualitas siswa.

Kata kunci: kode etik guru, profesionalisme, PGRI, tujuan pembelajaran

PENDAHULUAN

Kode etik merupakan pedoman perilaku dan etika yang menentukan standar tindakan dan keputusan dalam suatu profesi atau komunitas. Di lingkungan pendidikan, kode etik adalah aturan yang harus diikuti oleh guru dan panggilan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengajar. Guru adalah profesi yang mempunyai peran penting dalam mendidik dan membimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi kode etik guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Guru yang mematuhi kode etik memiliki kemampuan mengajar yang lebih baik, serta dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi kode etik di kalangan guru. Implementasi kode etik guru memiliki dampak positif terhadap profesionalisme guru dan kualitas pendidikan. (Naibaho & Rostiar, 2025)

Secara umum, kode etik merujuk pada kumpulan peraturan sistematis atau simbol-simbol yang disepakati untuk memastikan kesepakatan, keputusan, atau keabsahan suatu informasi. Kode etik guru Indonesia dibuat sesuai dengan tujuan pendidikan dan standar masyarakat yang berlaku, dan dirancang untuk dipahami dan diterapkan oleh tenaga pendidik dan calon pendidik Indonesia sebelum memulai pekerjaan mereka. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa seorang guru adalah tokoh yang memiliki tanggung jawab utama mengajar, membimbing atau membina, mengarahkan atau menuntun, melatih, melakukan penilaian, dan mengevaluasi kinerja siswa secara formal. Tidak hanya itu, para guru juga wajib memiliki kompetensi guru. Diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial.

Pelanggaran kode etik guru merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak jangka panjang terhadap pembelajaran, siswa, dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Ketika pelanggaran kode etik terjadi, misalnya dalam bentuk tindakan diskriminatif, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya netralitas dalam penilaian, atau perilaku tidak pantas, hal ini dapat memengaruhi kualitas pembelajaran secara langsung. Salah satu dampak paling nyata adalah hilangnya kepercayaan siswa terhadap guru. Dalam proses pembelajaran, hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan partisipatif. Namun, jika siswa merasa bahwa guru mereka tidak adil, tidak menghormati, atau bahkan merugikan, motivasi belajar mereka bisa menurun drastis. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar, kesulitan dalam memahami materi, serta ketidakmampuan untuk mencapai potensi akademis mereka secara penuh. Selain itu, pelanggaran kode etik dapat menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif. (Pratama, Nurtaqim, Syaadah, & Nugroho, 2025)

Seperti kasus pelanggaran kode etik guru yang terjadi di SMA Negeri 3 Medan, dimana terdapat oknum guru yang melakukan tindakan pungutan liar dengan meminta uang pelicin sebesar Rp10 juta kepada orang tua calon siswa agar bisa diterima di SMA Negeri 3 Medan. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran standar moral yang harus dijunjung tinggi dalam profesi ini. Guru seharusnya menjadi figur teladan yang menjunjung tinggi kejujuran dan memberikan layanan pendidikan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), proses seleksi seharusnya berjalan transparan dan berlandaskan aturan yang jelas, seperti sistem zonasi yang dirancang untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Selain itu, tindakan ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika penerimaan siswa tidak lagi berdasarkan prestasi atau ketentuan yang sah, melainkan berdasarkan kemampuan finansial, proses pembelajaran di sekolah tersebut menjadi tidak sehat.

Dampak dari pelanggaran salah satu kode etik guru ini juga berpengaruh pada siswa. Jika siswa mengetahui bahwa penerimaan di sekolah melibatkan praktik-praktik tidak jujur seperti pungutan liar, suap atau korupsi, maka hal ini dapat mengikis semangat belajar dan membangun pandangan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh kerja keras atau kemampuan, melainkan oleh uang dan orang dalam sekolah tersebut. Hal ini akan berdampak negatif pada pembentukan karakter generasi muda, yang justru seharusnya

dididik untuk menjunjung tinggi etika dan kejujuran. Pelanggaran kode etik ini merusak integritas institusi pendidikan. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sekolah dan para pendidik, yang seharusnya menjadi pilar dalam membentuk masa depan bangsa. Kasus-kasus seperti ini memperburuk citra dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan meritokrasi. (Yenti & Darmiyanti, 2023)

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menentukan adanya kode etik guru bagi semua anggota PGRI, mulai guru SD, SMP, sampai SMA/K. Dalam kode etik tersebut dinyatakan bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, guru Indonesia turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, guru Indonesia wajib untuk mempedomani dasar-dasar kode etik guru yang terdiri atas melaksanakan kewajiban dengan dasar niat yang baik, dengan kesadarn pengabdian; memperlakukan siapa pun, anak didik atau kolega sebagai satu pribadi yang sama dengan dirinya sendiri; menghormati perasaan, prestis dan prestasi setiap orang dengan menyimpan rahasia kasus pribadi seseorang, sebagaimana juga loyal dalam menyimpan rahasia negara, sebaiknya menghormati prestasi seseorang tanpa menyembunyikan rasa hormat, penghargaan yang sewajarnya kepada mereka yang berhak; selalu berusaha menyumbangkan ide, konsepsi dan karya ilmiah demi kemajuan bidang kewajibannya; akan menerima haknya semata-mata sebagai satu kehormatan dan bukan karena pamrih. (Mulyadi, 2018)

Peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik guru sangat berpengaruh terhadap siswa, terutama dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran. Dampak terhadap siswa dapat berkaitan dengan berbagai aspek, seperti psikologis, motivasi belajar, dan kualitas interaksi di lingkungan pendidikan. Ketika seorang guru melanggar kode etik, dampak langsung yang paling dirasakan oleh siswa adalah terganggunya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Guru yang melakukan pelanggaran, seperti bersikap kasar, menunjukkan favoritisme, atau tidak menghormati nilai-nilai profesionalisme, dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif. Siswa mungkin merasa cemas, tidak dihargai, atau bahkan takut berinteraksi dengan guru tersebut. Hal ini pada akhirnya menghambat kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. (B, Abidin, & Mosiba, 2022)

Selain itu, dampak yang siswa rasakan adalah penurunan motivasi belajar. Seorang siswa yang merasa tidak diperlakukan secara adil atau mengalami perlakuan yang tidak profesional dari gurunya bisa kehilangan semangat untuk belajar. Siswa yang merasa terintimidasi atau tidak nyaman di dalam kelas mungkin akan mengalami kesulitan dalam menyerap materi pelajaran, bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Ketidaknyamanan psikologis ini secara langsung berpengaruh pada hasil belajar siswa, baik dalam bentuk prestasi akademik maupun kemampuan kritis dan kreatif yang seharusnya berkembang melalui interaksi dengan guru yang kompeten dan beretika. Ketika seorang guru yang melanggar kode etik tidak menerima konsekuensi yang setimpal, siswa mungkin melihat bahwa pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja. Hal ini berpotensi merusak rasa keadilan yang ada dalam pikiran siswa dan menimbulkan perasaan apatis terhadap aturan atau norma yang ada di sekolah. Sehingga diperlukan upaya PGRI dalam mendukung terimplementasinya kode etik guru dengan baik. Karena dengan baiknya implementasi kode etik guru maka juga semakin mendukung kualitas siswa dan masa depan bangsa. Siswa yang merasakan manfaat efektifnya implementasi kode etik guru maka dapat semakin termotivasi untuk menjadi generasi muda yang bertanggung jawab, bermoral dan mampu bersikap sesuai dengan nilai dan norma Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang terbagi dalam dua bagian diantaranya wawancara dan studi pustaka. Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode wawancara dalam jurnal ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam dari partisipan yang relevan. Peneliti mewawancarai beberapa pihak tentang Peran PGRI dalam pelanggaran kode etik guru, berdampak pada tujuan pembelajaran. Wawancara melibatkan berbagai pihak, seperti guru, pengurus PGRI, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, studi literatur juga digunakan untuk melengkapi data lapangan dengan informasi teoretis dan penelitian sebelumnya yang relevan. Studi Pustaka dalam tugas ini mencakup kajian dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait etika profesi guru, peran organisasi profesi seperti PGRI, serta dampak pelanggaran kode etik terhadap proses dan tujuan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kode Etik Guru

Kata etik berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan "cara berbuat menjadi ada karena persetujuan dari kelompok manusia" dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut kode sehingga muncullah apa yang dinamakan kode etik atau secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Secara etimologis kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi." (AR, 2016)

Kode etik guru adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang disepakati oleh para pendidik untuk menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengajar. (Fahrudin & Sari, 2020) Kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku guru dalam interaksi dengan siswa, orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat. Di Indonesia, kode etik guru diatur oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan bertujuan untuk menjaga martabat profesi guru serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi siswa. Oleh karena itu, kode etik ini sangat penting untuk memastikan bahwa guru menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kode etik guru mencakup beberapa aspek utama yang menjadi ruang lingkungannya.

- Profesionalisme

Salah satu aspek utama dalam kode etik guru adalah profesionalisme. Guru diharapkan untuk menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam bidangnya dan terus mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan. Profesionalisme ini mencakup pemahaman mendalam tentang kurikulum, metode pengajaran yang efektif, serta kemampuan untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara objektif. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi penyampai informasi tetapi juga fasilitator yang membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka.

- Kualitas Pendidikan

Kode etik juga menekankan pentingnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Guru harus memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini termasuk memperhatikan keberagaman dalam kelas serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru diharapkan mampu menerapkan pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

- Komunikasi Efektif

Komunikasi yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan rekan sejawat adalah aspek penting lainnya dari kode etik guru. Guru harus mampu menjalin hubungan yang positif dengan semua pihak terkait dalam proses pendidikan. Hal ini mencakup keterbukaan dalam berkomunikasi mengenai perkembangan siswa, tantangan yang dihadapi di kelas, serta kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan komunikasi yang efektif, diharapkan akan tercipta sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pendidikan anak.

- Penghormatan dan Empati

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan adil terhadap semua individu juga merupakan bagian integral dari kode etik guru. Guru harus memperlakukan semua siswa dengan empati dan menghargai perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Dengan menunjukkan rasa hormat dan empati, guru dapat membangun hubungan yang kuat dengan siswa, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran.

- Kesejahteraan Siswa

Kesejahteraan siswa menjadi prioritas utama dalam kode etik guru. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Ini termasuk menjaga keselamatan fisik dan psikologis siswa serta memberikan dukungan ketika mereka menghadapi masalah pribadi atau akademik. Dengan memperhatikan kesejahteraan siswa secara holistik, guru dapat berkontribusi pada pembentukan karakter positif dan kepribadian yang baik pada diri siswa.

-Tantangan dalam Implementasi Kode Etik

Meskipun kode etik guru memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa kasus pelanggaran etika oleh guru dapat terjadi akibat tekanan dari berbagai pihak atau kurangnya pemahaman mengenai kode etik itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memberikan pelatihan berkala mengenai kode etik kepada para guru agar mereka dapat memahami dan menerapkannya dengan baik.

2. Peran PGRI dalam Menjaga Profesionalisme Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Sebagai organisasi profesi terbesar bagi tenaga pendidik, PGRI tidak hanya berfungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak guru, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Peran PGRI dalam menjaga profesionalisme guru dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain melalui fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi, advokasi kebijakan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan kolaborasi antarpendidik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Salah satu peran utama PGRI adalah sebagai fasilitator dalam pengembangan profesionalisme guru. PGRI menyelenggarakan berbagai program pelatihan, seminar, dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek, termasuk kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian.

Pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya berfokus pada penguatan metode pengajaran yang inovatif, tetapi juga bertujuan untuk membangun karakter dan etika profesional guru. Dengan demikian, diharapkan para pendidik tidak hanya memahami teori pendidikan secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan metode pembelajaran secara efektif dalam kegiatan belajar-mengajar. Selain berperan dalam pengembangan kompetensi guru, PGRI juga memiliki fungsi sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sebagai organisasi profesi, PGRI sering menjadi jembatan antara guru dan pemerintah dalam mengawal kebijakan pendidikan yang berpihak pada peningkatan kualitas tenaga pengajar. Salah satu bentuk advokasi yang dilakukan PGRI adalah dalam pelaksanaan program sertifikasi guru, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan regulasi yang

berlaku. Meskipun program sertifikasi telah berjalan, PGRI tetap berperan dalam mengawal implementasinya agar kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Di samping itu, PGRI juga berperan dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpendidik, serta membangun kemitraan antara guru, pemerintah, komunitas pendidikan, dan masyarakat. Interaksi dan pertukaran informasi yang efektif antarpendidik dapat meningkatkan kualitas pengajaran serta mendorong inovasi dalam dunia pendidikan. Kolaborasi yang baik antara guru dengan pemangku kepentingan lainnya juga berkontribusi dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan tenaga pengajar serta peserta didik. Dalam menghadapi era digital dan Revolusi Industri 4.0, PGRI turut mendorong tenaga pendidik untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan. Organisasi ini berupaya menyediakan akses terhadap berbagai pelatihan berbasis digital guna meningkatkan keterampilan guru dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru tidak hanya mampu menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran.

Efektivitas peran PGRI dalam menjaga profesionalisme guru juga dapat dilihat dari upaya organisasi ini dalam melakukan analisis akademik serta evaluasi terhadap hasil pembelajaran. PGRI mendorong para tenaga pendidik untuk secara berkala melakukan refleksi terhadap metode pengajaran yang telah diterapkan, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan mencari solusi yang lebih efektif. Selain itu, PGRI juga mengadakan pertemuan evaluasi secara rutin guna meningkatkan efektivitas strategi pengajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik. Dengan berbagai peran strategis yang dijalankan, PGRI memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga profesionalisme guru di Indonesia. Melalui program pelatihan, advokasi kebijakan, peningkatan kesejahteraan, penguatan kolaborasi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi, PGRI terus berupaya memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dari PGRI, diharapkan tenaga pendidik di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. (Aidi, Abidin, Asy'ari, & Nurrochim, 2023)

3. Dampak Pelanggaran Kode Etik Guru terhadap Tujuan Pembelajaran

Pelanggaran kode etik guru merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan karena dapat memberikan dampak besar terhadap tujuan pembelajaran. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seorang guru seharusnya berinteraksi dengan siswa, rekan sejawat, dan masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Ketika seorang guru melanggar kode etik, baik dalam hal perilaku, sikap, atau tindakan, dampaknya tidak hanya terasa pada dirinya sendiri tetapi juga pada kualitas pembelajaran dan tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satu dampak utama dari pelanggaran kode etik guru terhadap tujuan pembelajaran adalah terganggunya hubungan antara guru dan siswa. Dalam konteks pendidikan, hubungan yang sehat antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung keberhasilan pembelajaran.

Guru harus menjadi teladan bagi siswa, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Ketika seorang guru melanggar kode etik, seperti menunjukkan perilaku tidak profesional, diskriminatif, atau tidak adil dalam perlakuan terhadap siswa, ini dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan siswa terhadap guru. Hal ini berdampak negatif pada hubungan emosional antara keduanya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar. Jika siswa merasa tidak dihargai atau tidak diperlakukan dengan adil, mereka akan kehilangan motivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kurangnya motivasi dan rasa tidak percaya terhadap guru akan menghambat perkembangan potensi siswa, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Siswa mungkin menjadi lebih tertutup atau bahkan tidak merasa aman untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya kepada guru mereka. Semua ini mengarah pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai secara maksimal.

Pelanggaran kode etik juga bisa menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian dan perlakuan terhadap siswa. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah favoritisme, di mana seorang guru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap siswa berdasarkan preferensi pribadi, bukan berdasarkan usaha dan kemampuan siswa itu sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan dan dapat merusak integritas proses penilaian. Ketidakadilan dalam penilaian dapat membuat siswa merasa tidak dihargai dan meragukan objektivitas sistem pendidikan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap proses belajar mengajar. Selain itu, jika seorang guru tidak mematuhi kode etik dalam berinteraksi dengan siswa, misalnya dengan mengabaikan batasan profesional atau

melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, hal ini dapat menurunkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Siswa akan merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman, yang tentu saja menghalangi proses pembelajaran yang seharusnya berjalan dengan lancar. Pembelajaran yang efektif membutuhkan suasana yang aman, terbuka, dan penuh rasa saling menghargai antara guru dan siswa. Tanpa kondisi ini, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan optimal. Pelanggaran kode etik juga dapat merusak citra profesi guru di mata masyarakat. Guru seharusnya menjadi teladan dalam segala hal, tidak hanya dalam hal kompetensi akademik, tetapi juga dalam hal perilaku dan etika. Ketika seorang guru terlibat dalam pelanggaran kode etik, ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap guru dan profesi pendidikan secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mulai meragukan kualitas pendidikan yang diberikan dan bahkan bisa memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih pendidikan bagi anak-anak mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berakibat pada menurunnya minat terhadap profesi guru, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terhadap pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri.

Salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter dan keterampilan siswa secara holistik. Namun, apabila guru tidak mematuhi kode etik, terutama dalam hal integritas dan keadilan, maka nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan kepada siswa akan sulit tercapai. Guru yang tidak menjalankan tanggung jawab etik dengan baik akan kesulitan dalam memberikan contoh yang baik bagi siswa, yang seharusnya menjadi dasar dalam membentuk karakter mereka. Sebagai penutup, pelanggaran kode etik guru memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap tujuan pembelajaran. Kerusakan hubungan antara guru dan siswa, ketidakadilan dalam penilaian, serta penurunan citra profesi guru adalah beberapa contoh konkret dari dampak negatif yang bisa terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap guru untuk mematuhi kode etik dan menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, adil, dan produktif. (Thesia, Sembiring, Sijabat, & Yunita, 2024)

4. Efektivitas Peran PGRI dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus

memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di sekolah.

Memadai atau maksimal untuk memberikan perlindungan kepada guru. Hal ini hanya melalui perubahan terhadap Undang-undang, maka implikasi hukumnya akan jauh lebih terlihat. Selain dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 ini secara jelas juga menyebut upaya perlindungan guru dalam Pasal 40, yang menyebutkan:

- 1). Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2). Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh Guru melalui perlindungan:

- a) Hukum;
- b) Profesi; dan
- c) Keselamatan dan kesehatan kerja.

- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan. Upaya perlindungan lain termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- 3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan

keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Selanjutnya perlindungan guru dijelaskan juga pada Pasal 42 PP No. 74 Tahun 2008 bahwa guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 40, 41, dan 44 PP Nomor 74 tahun 2008 tersebut, dapat disarikan bahwa guru berhak mendapatkan empat jenis perlindungan yaitu, (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja, (4) hak atas kekayaan intelektual

Untuk meningkatkan profesionalisme guru, penting bagi mereka untuk memiliki seperangkat kompetensi dan keterampilan yang memungkinkan mereka melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi tanggung jawab mereka. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil guru yang kurang patuh terhadap peraturan yang ada, yang seringkali berujung pada pelanggaran etik profesi. (Budoyo, 2022)

Baru-baru ini, sejumlah kasus pelanggaran etik guru terungkap, yang melibatkan perilaku tidak profesional seperti kekerasan terhadap siswa, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merusak integritas profesi mereka. Misalnya, pada tahun 2023, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Jakarta dilaporkan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap siswa yang tidak mengerjakan PR, yang mengakibatkan cedera ringan pada siswa tersebut. Kasus lainnya terjadi di Bandung, di mana seorang guru dilaporkan melakukan diskriminasi terhadap siswa berdasarkan latar belakang ekonomi mereka, dengan memberi perlakuan berbeda dalam ujian dan tugas sekolah. Selain itu, pada tahun 2024, seorang guru di Jombang dilaporkan karena kelalaian dalam mengawasi siswa saat jam kosong, yang mengakibatkan seorang siswa terluka parah. Kasus lainnya di Konawe Selatan, seorang guru honorer dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid yang kemudian berujung pada proses hukum yang melibatkan dugaan pemerasan uang damai. Kasus-kasus ini menggambarkan pentingnya pemahaman dan penerapan kode etik secara konsisten untuk menjaga integritas profesi pendidikan dan mencegah dampak negatif yang lebih besar bagi siswa. (Nabila, 2023)

Menjadi guru adalah profesi yang sangat menuntut profesionalisme. Seorang guru harus bekerja dengan sikap profesional dalam setiap aspek pekerjaannya, termasuk dalam

interaksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua siswa, dan masyarakat. Sebagai pedoman dalam berinteraksi, kode etik guru memainkan peran penting dalam menjaga kualitas hubungan antara guru, siswa, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan.

Kode etik dapat mengarahkan interaksi yang sehat antara teman sejawat, klien, dan profesional lainnya. Kode etik guru berfungsi untuk menghindari kesalahan serta permasalahan dalam pekerjaan profesionalnya, yang berpotensi mempengaruhi kredibilitas dan efektivitas dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, kehadiran guru yang profesional sangat vital bagi kesuksesan proses pembelajaran, karena guru berperan penting dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa, baik di ruang kelas maupun di luar kelas. (Annisa & Anggoro, 2025)

KESIMPULAN

Pentingnya kode etik guru dalam menjaga profesionalisme dan kualitas pendidikan. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi guru dengan siswa, rekan sejawat, dan masyarakat. Pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan tindakan tidak profesional lainnya, dapat berdampak negatif terhadap proses pembelajaran dan menurunkan kepercayaan siswa terhadap guru. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ini juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif, menghambat motivasi siswa, dan merusak integritas institusi pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik sangat penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran penting dalam memastikan implementasi kode etik guru secara efektif. PGRI berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, advokasi kebijakan, serta penyediaan perlindungan hukum bagi para pendidik. Selain itu, PGRI juga berperan dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik agar tidak berdampak luas terhadap siswa dan sistem pendidikan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan dukungan dari organisasi profesi seperti PGRI, diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, mendukung perkembangan karakter siswa, dan memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.

SARAN

Agar kode etik guru dapat diterapkan dengan lebih baik, diperlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak, termasuk guru, sekolah, dan organisasi profesi seperti PGRI. Guru perlu terus meningkatkan pemahaman mereka tentang kode etik serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Sekolah harus memberikan dukungan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang terjadi. PGRI juga diharapkan lebih aktif dalam melakukan pelatihan, advokasi, serta pengawasan terhadap penerapan kode etik di lapangan. Selain itu, peran serta masyarakat dan orang tua siswa dalam mengawasi serta melaporkan pelanggaran juga sangat penting agar dunia pendidikan tetap berjalan dengan adil, transparan, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, H. H., Abidin, Z., Asy'ari, H., & Nurrochim. (2023). Peran Organisasi PGRI dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 94-103.
- Annisa, R. E., & Anggoro, B. K. (2025). Pengaruh Penerapan Kode Etik Guru Terhadap Kualitas Interaksi Pembelajaran dan Kedisiplinan di Sekolah. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, 450-462.
- AR, A. Z. (2016). Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan . *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- B, M. R., Abidin, N. A., & Mosiba, R. (2022). Implementasi Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Soppeng. *Implementasi kode etik guru*.
- Budoyo, S. (2022). Efektivitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru di Kota Semarang. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 181-187.
- Fahrudin, A. H., & Sari, E. N. (2020). Implementasi Kode Etik Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Mulyadi. (2018). Menegakkan Kode Etik Profesi Guru: Sebuah Pandangan Wawasan Filsafat Pendidikan. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 1.
- Nabila, G. (2023). Pengaruh Kode Etik Guru bagi Guru yang Profesional. *Jurnal Pembelajaran*, 5-11.
- Naibaho, D., & Rostiar. (2025). Pentingnya Kode Etik dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Sains Student Research*, 1.
- Pratama, F. N., Nurtaqim, A. B., Syaadah, L., & Nugroho, P. (2025). KODE ETIK GURU PAI INDONESIA PERSPEKTIF PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Studi Islam*, 133-145.
- Thesia, D. P., Sembiring, E. B., Sijabat, Y. G., & Yunita, S. (2024). Dampak Pelanggaran Etika Profesi Guru Terhadap Keprofesionalannya Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 163-167.

Yenti , R. F., & Darmiyanti, A. (2023). Peran Kode Etik Guru sebagai Landasan Berprilaku dalam Pengembangan Pendidikan. *Journal On Education*, 2908-2913.